

Rudy C Tarumingkeng

Algoritma Media Sosial, Polarisasi Politik, dan Narasi Kebencian



*Rudy C Tarumingkeng: Eksplorasi Pengaruh Algoritma Media Sosial
terhadap Polarisasi Politik dan Narasi Kebencian*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Guru Besar Manajemen, NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988)

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar IPB-University, Bogor (2005-2006)

Ketua Senat Akademik IBM-ASMI, Jakarta

© RUDYCT e-PRESS

rudymt75@gmail.com

Bogor, Indonesia

3 Agustus 2025

Berikut ini adalah narasi analitis yang menjelaskan bagaimana algoritma media sosial berperan dalam memengaruhi polarisasi politik dan menyebarkan narasi kebencian:

Eksplorasi Pengaruh Algoritma Media Sosial terhadap Polarisasi Politik dan Narasi Kebencian

Di era digital, media sosial telah menjadi arena utama bagi pertukaran informasi, opini, dan emosi publik. Namun, di balik kemudahan berbagi dan berinteraksi, terdapat sistem algoritma yang tidak netral. Algoritma media sosial—yang didesain untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna—secara tak langsung membentuk apa yang kita lihat, siapa yang kita dengar, dan pada akhirnya, apa yang kita percayai. Dalam konteks politik dan sosial, algoritma ini telah menjadi bahan bakar bagi meningkatnya polarisasi dan menyebarnya narasi kebencian.

1. Apa Itu Algoritma Media Sosial?

Algoritma media sosial adalah serangkaian instruksi matematika dan logika yang dirancang untuk mengatur dan mempersonalisasi konten yang ditampilkan kepada pengguna. Setiap kali seseorang menyukai, membagikan, atau mengomentari suatu postingan, algoritma mencatat perilaku itu dan menggunakannya untuk memprediksi konten apa yang paling mungkin membuat pengguna tetap aktif.

Platform seperti Facebook, Twitter (sekarang X), Instagram, dan YouTube tidak menyusun linimasa secara kronologis, melainkan berdasarkan “relevansi.” Relevansi ini diukur lewat interaksi—semakin banyak klik, komentar, dan bagikan, semakin tinggi kemungkinan

konten itu didorong ke lebih banyak pengguna. Masalahnya, konten yang memicu emosi ekstrem—marah, takut, benci—cenderung menghasilkan interaksi yang lebih tinggi dibanding konten netral atau informatif.

2. Algoritma dan Polarisasi Politik

Polarisasi politik mengacu pada pembentukan dua kutub pandangan politik yang ekstrem dan berlawanan, dengan semakin sedikit ruang untuk konsensus atau dialog. Di media sosial, algoritma memperkuat proses ini dalam beberapa cara:

a. Filter Bubble dan Echo Chamber

Saat algoritma menyaring konten berdasarkan preferensi pengguna, terbentuklah apa yang disebut *filter bubble*—lingkungan digital di mana seseorang hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan pandangannya. Jika seseorang sering menyukai konten pro-partai A, maka mereka akan lebih sering melihat postingan serupa dan semakin jarang melihat argumen dari pihak B.

Akibatnya, pengguna tenggelam dalam *echo chamber*, di mana pendapat mereka hanya dikonfirmasi, bukan diuji. Ini mendorong keyakinan bahwa “pihak lain” salah atau bahkan berbahaya, karena tidak pernah ada interaksi yang sehat dengan argumen berbeda.

b. Amplifikasi Konten Ekstrem

Penelitian menunjukkan bahwa algoritma cenderung mendorong konten yang lebih provokatif atau ekstrem karena tingkat keterlibatannya lebih tinggi. Misalnya, sebuah video YouTube yang mengandung teori konspirasi bisa lebih cepat viral dibanding video yang menawarkan penjelasan berbasis data karena narasi sensasional lebih memikat emosi penonton.

Demikian pula, politisi atau tokoh publik yang menggunakan retorika keras dan polarisatif sering mendapat perhatian lebih besar. Mereka “menang” dalam sistem algoritmik karena mampu menciptakan engagement tinggi, walau mengorbankan akurasi dan etika komunikasi.

c. Radikalisasi Bertahap

Proses polarisasi sering kali berjalan pelan dan tidak disadari. Seseorang yang awalnya hanya mencari informasi politik ringan bisa saja, melalui tautan algoritmik, diarahkan ke konten yang semakin ekstrem. Ini disebut *radicalization pipeline*. YouTube, misalnya, pernah dikritik karena sistem rekomendasinya bisa membawa pengguna dari video olahraga ke teori konspirasi ekstrem hanya dalam beberapa klik.

3. Narasi Kebencian dan Peran Algoritma

Selain memperkuat polarisasi, algoritma juga berkontribusi pada penyebaran narasi kebencian. Narasi kebencian merujuk pada pesan-pesan yang menyerang atau merendahkan kelompok berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual, atau identitas lainnya.

a. Viralisasi Konten Kebencian

Konten yang menimbulkan kemarahan atau ketakutan cenderung dibagikan lebih luas. Akibatnya, ujaran kebencian tidak hanya bertahan di pinggiran internet, tetapi dapat muncul di beranda orang-orang biasa. Postingan yang menstereotipkan kelompok tertentu atau menyebarkan hoaks bernuansa diskriminatif bisa menyebar jauh sebelum ada verifikasi atau klarifikasi.

Sebagai contoh, dalam berbagai pemilu di dunia—dari AS hingga Indonesia—media sosial digunakan untuk menyebarkan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang memicu konflik horizontal. Sering kali, algoritma mempercepat penyebaran isu-isu ini karena tingginya tingkat keterlibatan.

b. Normalisasi Bahasa Kekerasan

Ketika konten penuh kebencian terus-menerus muncul dan mendapat reaksi, lama-kelamaan standar komunikasi publik menurun. Kata-kata kasar, rasisme, seksisme, dan bentuk ujaran lain menjadi “biasa” karena dilihat berulang kali. Algoritma, dengan terus menampilkan konten serupa, memperkuat kesan bahwa pendapat ekstrem adalah hal yang wajar dan sah.

c. Targeting yang Selektif

Iklan politik dan konten propaganda kini menggunakan algoritma bukan hanya untuk menyebar, tapi untuk menarget secara presisi. Dengan data perilaku pengguna, pengiklan bisa mengirimkan pesan politik bernuansa kebencian ke kelompok tertentu tanpa diketahui publik luas. Ini membuat narasi diskriminatif dapat menyebar tanpa akuntabilitas karena sifatnya tersembunyi (*dark posts*).

4. Dampak Sosial dan Demokrasi

Gabungan antara polarisasi politik dan narasi kebencian menciptakan iklim sosial yang terfragmentasi, penuh kecurigaan, dan rawan konflik. Beberapa dampak yang signifikan antara lain:

Ketidakpercayaan terhadap institusi: Masyarakat yang terus menerus terpapar hoaks atau narasi bahwa “media bohong,” “ilmuwan dibeli,” atau “pemerintah korup” cenderung kehilangan kepercayaan terhadap institusi demokratis.

Konflik antarwarga: Polarisasi dan kebencian di dunia maya sering berujung pada konflik di dunia nyata, mulai dari perpecahan keluarga, segregasi sosial, hingga kekerasan fisik.

Menurunnya kualitas demokrasi: Jika wacana publik dipenuhi oleh kebohongan, manipulasi emosi, dan ujaran kebencian, maka proses demokratis—seperti pemilu atau debat publik—tidak lagi berjalan secara sehat.

5. Apakah Ini Salah Algoritma?

Penting untuk dicatat bahwa algoritma tidak memiliki niat jahat. Mereka hanyalah alat yang diatur untuk mencapai tujuan tertentu—dalam kasus media sosial, biasanya untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin. Masalah muncul ketika insentif bisnis (engagement dan iklan) berbenturan dengan etika sosial.

Dengan kata lain, algoritma bukan penyebab utama polarisasi atau kebencian, tapi mereka mempercepat dan memperbesar dampaknya.

Struktur desain mereka tidak didedikasikan untuk kebenaran, keadilan, atau kerukunan—melainkan untuk profit.

6. Solusi dan Tanggung Jawab

Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan dari berbagai pihak:

a. Platform Digital

Transparansi algoritma: Perusahaan teknologi harus membuka bagaimana sistem rekomendasi bekerja dan memberikan opsi kontrol kepada pengguna.

Moderasi konten: Investasi pada moderator manusia dan teknologi AI yang akurat untuk menyaring konten berbahaya secara proaktif.

Redesign insentif: Mengubah metrik keberhasilan dari “waktu tayang” menjadi “kualitas interaksi” dapat mengurangi dominasi konten toksik.

b. Pemerintah dan Regulator

Aturan platform digital: Undang-undang yang mengatur tanggung jawab platform terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, termasuk sistem denda atau sanksi.

Literasi digital: Program nasional untuk mengedukasi masyarakat tentang cara kerja algoritma, cara mengenali disinformasi, dan pentingnya dialog lintas pandangan.

c. Masyarakat dan Individu

Kesadaran pribadi: Menghindari reaksi impulsif terhadap konten provokatif, memverifikasi informasi, dan tidak ikut menyebarkan narasi kebencian.

Diversifikasi sumber informasi: Mengikuti media dan akun yang memiliki perspektif berbeda untuk keluar dari *echo chamber* pribadi.

Penutup

Algoritma media sosial bukan sekadar teknologi pasif. Mereka adalah aktor aktif dalam ekosistem informasi kita, dengan kekuatan untuk membentuk opini publik, mengubah perilaku politik, bahkan memicu konflik. Polarisasi politik dan narasi kebencian yang berkembang di platform digital bukan sekadar “dampak samping,” tapi konsekuensi sistemik dari model bisnis yang mengutamakan keterlibatan di atas segalanya.

Untuk melindungi ruang publik digital dan demokrasi itu sendiri, kita butuh pendekatan menyeluruh: perubahan kebijakan, desain platform yang lebih etis, dan masyarakat yang lebih sadar digital. Jika tidak, algoritma akan terus memperdalam jurang di antara kita—bukan dengan niat, tapi karena desain.

Berikut adalah **penjelasan tambahan** untuk melengkapi eksplorasi sebelumnya tentang bagaimana algoritma media sosial memengaruhi polarisasi politik dan narasi kebencian:

Lanjutan Eksplorasi:

Dimensi Sosial, Psikologis, dan Global dari Algoritma Media Sosial terhadap Polarisasi Politik dan Narasi Kebencian

Jika kita hanya melihat algoritma dari sisi teknis, maka kita akan kehilangan dimensi terpenting: manusia yang menggunakannya. Algoritma bukan bekerja dalam ruang hampa—mereka beroperasi dalam dunia yang sudah memiliki ketegangan politik, ketidaksetaraan sosial, dan prasangka kolektif. Dalam bagian lanjutan ini, kita akan menggali lebih dalam: bagaimana algoritma berinteraksi dengan sifat psikologis manusia, memperkuat kecenderungan tribal, dan berdampak lintas negara.

1. Psikologi Sosial dan Algoritma: Mengapa Polarisasi Itu Laku?

Untuk memahami mengapa algoritma menyukai konten polarisatif, kita perlu memahami manusia. Secara alami, manusia tertarik pada konflik, drama, dan identitas kelompok. Media sosial tidak menciptakan kecenderungan ini—mereka hanya mengeksploitasinya.

a. Bias Konfirmasi dan Disonansi Kognitif

Otak manusia cenderung mencari informasi yang menguatkan keyakinan yang sudah ada (*confirmation bias*) dan menolak informasi yang bertentangan (*cognitive dissonance*). Ketika algoritma memprioritaskan keterlibatan, konten yang sejalan dengan keyakinan pengguna akan muncul lebih sering. Ini memperkuat polarisasi karena mempersempit wawasan seseorang secara bertahap namun konsisten.

Contoh: Seorang pengguna yang anti-vaksin akan lebih sering melihat artikel, video, dan komentar dari komunitas yang sama. Algoritma tidak peduli apakah informasi itu benar—yang penting pengguna terus menggulir layar dan berinteraksi.

b. Naluri Kelompok dan ‘Kami vs Mereka’

Manusia memiliki dorongan kuat untuk merasa menjadi bagian dari kelompok (*ingroup*). Sekali kita merasa menjadi bagian dari kelompok A, maka kita secara otomatis mencurigai kelompok B. Algoritma memperparah kecenderungan ini dengan menciptakan lingkaran informasi yang memperkuat identitas kelompok—baik itu berdasarkan politik, agama, ras, atau gender.

Narasi kebencian sering kali tumbuh dari skema sederhana: “kita” adalah korban, “mereka” adalah ancaman. Algoritma menyebarkan pola pikir ini dengan efisiensi brutal.

2. Disinformasi sebagai Bahan Bakar Polarisasi

Polarisasi tidak hanya terjadi karena perbedaan pendapat yang tulus, tetapi juga karena adanya aktor-aktor yang secara aktif menyebarkan disinformasi untuk keuntungan politik atau ekonomi. Di sinilah algoritma menjadi alat yang sangat efektif.

a. Penyebaran Hoaks dan Teori Konspirasi

Di banyak negara, hoaks menjadi senjata utama dalam kontestasi politik. Dari kampanye hitam yang menyebar di WhatsApp grup keluarga hingga video manipulatif yang viral di TikTok, informasi palsu sering kali lebih cepat menyebar daripada klarifikasinya. Algoritma, yang menghargai emosi dan keterlibatan, justru memprioritaskan konten seperti ini.

b. Manufaktur Ketakutan dan Kecurigaan

Narasi bahwa "musuh sedang berkonspirasi", "ada kekuatan asing yang mengancam bangsa", atau "kelompok minoritas ingin menguasai

mayoritas" adalah bentuk disinformasi yang sangat efektif secara emosional. Algoritma menyebarkannya dengan luas karena banyak pengguna terpicu untuk membagikan dan mengomentarnya.

c. Aktor Luar dan Operasi Informasi

Tak jarang, disinformasi bukan hanya berasal dari dalam negeri. Negara atau kelompok asing bisa menggunakan *bot*, akun palsu, dan konten berbayar untuk memperkeruh situasi politik suatu negara. Fenomena ini pernah terjadi di pemilu AS (2016), Brasil, India, dan Indonesia. Algoritma yang netral secara geografis justru memberi jalan bagi infiltrasi ini tanpa hambatan berarti.

3. Media Sosial dan Polarisasi di Dunia Nyata

Salah satu kesalahan persepsi adalah menganggap bahwa konflik di media sosial hanya sebatas dunia maya. Faktanya, retorika dan polarisasi yang diperkuat secara digital sering kali punya konsekuensi langsung di dunia nyata.

a. Kekerasan dan Radikalisasi

Beberapa kasus penembakan massal dan aksi terorisme di dunia memiliki jejak digital yang jelas—pelaku sebelumnya aktif di forum atau media sosial yang mendorong narasi kebencian. Dalam beberapa kasus, pelaku merasa dipuji atau dibenarkan oleh komunitas online yang tertutup.

Contoh:

Kasus Christchurch di Selandia Baru (2019) di mana pelaku menyiarkan langsung aksinya dan sebelumnya aktif dalam forum penuh ujaran kebencian.

Kerusuhan Capitol AS (2021) juga dipicu oleh gelombang disinformasi yang menyebar secara masif di media sosial.

b. Fragmentasi Sosial

Polarisasi tidak hanya memecah politik, tapi juga keluarga, komunitas, dan lingkungan kerja. Banyak orang melaporkan ketegangan yang meningkat karena perbedaan pandangan politik yang dipicu oleh narasi online. Platform digital, alih-alih menjadi jembatan antarindividu, justru menjadi tembok digital antar kubu.

4. Perbedaan Dampak Berdasarkan Konteks Negara

Penting untuk dicatat bahwa dampak algoritma berbeda-beda tergantung pada konteks sosial-politik suatu negara. Negara dengan demokrasi kuat dan pendidikan media tinggi mungkin lebih mampu meredam dampaknya, sementara negara dengan ketimpangan informasi tinggi justru sangat rentan.

a. Negara Berkembang

Di banyak negara berkembang, media sosial adalah sumber informasi utama karena akses ke media tradisional yang terbatas. Ini menciptakan situasi di mana hoaks dan narasi ekstrem menyebar tanpa lawan. Lebih parah lagi, literasi digital masyarakat yang rendah membuat mereka tidak mampu membedakan antara fakta dan propaganda.

b. Negara Otoriter

Beberapa negara menggunakan algoritma untuk memanipulasi opini publik, bukan sekadar untuk profit. Di Tiongkok, misalnya, algoritma TikTok versi lokal (Douyin) difilter ketat agar tidak menampilkan konten politik. Sebaliknya, konten pendidikan dan positif lebih diprioritaskan. Ini menunjukkan bahwa desain algoritma sangat bergantung pada niat pemilik platform dan kontrol negara.

5. Peran Platform: Apakah Mereka Peduli?

Platform media sosial seperti Facebook, X, YouTube, dan TikTok sering kali mengklaim netral. Tapi realitanya, keputusan desain, moderasi,

dan prioritas bisnis mereka adalah keputusan politik terselubung. Beberapa contoh menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini tahu akan dampak algoritma mereka, namun tetap memprioritaskan profit:

Facebook diketahui internalnya telah menyadari sejak 2018 bahwa algoritma mereka meningkatkan polarisasi, tapi hanya melakukan sedikit perubahan karena takut menurunkan engagement.

YouTube pernah secara aktif mendorong konten konspiratif lewat fitur *Up Next*, yang pada akhirnya meningkatkan waktu tonton pengguna, tapi juga menyebarkan misinformasi.

Twitter (X) di bawah kepemimpinan baru bahkan menurunkan standar moderasi, yang mempercepat penyebaran ujaran kebencian.

Dengan kekuasaan yang hampir tak terbatas dalam ekosistem informasi global, perusahaan ini memiliki peran besar dalam membentuk lanskap opini dan sosial dunia.

6. Menuju Algoritma yang Bertanggung Jawab

Masalah algoritma bukanlah masalah yang tak bisa dipecahkan. Beberapa solusi sudah mulai diuji dan diterapkan di berbagai tempat:

a. Algoritma Transparan dan Terbuka

Beberapa pakar mendesak agar platform membuka kode algoritma atau setidaknya memberikan *audit publik* atas bagaimana konten dikurasi. Dengan begitu, para peneliti dan publik bisa mengevaluasi apakah algoritma benar-benar netral atau malah memperkuat polarisasi.

b. Opsi Personalisasi Terbalik

Pengguna bisa diberikan kontrol untuk memilih apakah ingin melihat konten berdasarkan algoritma atau secara kronologis. Instagram dan X sudah mulai menerapkan opsi ini, tapi sering disembunyikan dalam pengaturan dan bukan sebagai default.

c. Etika Desain Produk

Beberapa platform baru mencoba pendekatan desain etis. Misalnya, Mastodon dan Threads membatasi penyebaran konten viral demi menjaga kualitas diskusi. Selain itu, ada dorongan untuk mendesain algoritma berdasarkan “kualitas informasi” bukan hanya “keterlibatan emosi.”

7. Peran Generasi Muda dan Literasi Baru

Generasi muda yang tumbuh bersama media sosial memiliki tanggung jawab ganda: sebagai korban sekaligus agen perubahan.

a. Pendidikan Algoritma

Sekolah dan kampus perlu mengajarkan *bagaimana algoritma bekerja*, bukan sekadar mengajarkan cara memakai media sosial. Jika seseorang tahu bahwa kontennya dipilih karena bisa memancing emosinya, dia akan lebih waspada.

b. Jurnalisme dan Verifikasi Komunitas

Banyak inisiatif warga dan jurnalis muda yang bergerak dalam *fact-checking* dan *debunking hoaks*. Ini adalah tren positif yang perlu diperluas, didanai, dan dijadikan bagian integral dari ekosistem digital.

Penutup: Menyadari Bahaya, Membangun Tanggung Jawab

Algoritma media sosial bukanlah musuh, tapi juga bukan teman. Mereka adalah alat yang sangat kuat—dan seperti semua alat, ia bisa membangun atau menghancurkan, tergantung siapa yang menggunakannya dan untuk tujuan apa.

Polarisasi politik dan narasi kebencian tidak hanya melemahkan masyarakat, tetapi juga merusak tatanan demokrasi dan nilai kemanusiaan. Jika kita ingin menjaga ruang publik yang sehat—baik

fisik maupun digital—maka kita harus menantang dominasi algoritma yang dirancang hanya untuk klik dan tayang.

Dengan regulasi yang tegas, pendidikan yang relevan, dan tanggung jawab sosial dari semua pihak, kita masih punya peluang untuk membentuk internet yang lebih adil, lebih manusiawi, dan tidak menjadikan kebencian sebagai konten unggulan.

Berikut adalah **refleksi dan diskusi** yang memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana algoritma media sosial memengaruhi polarisasi politik dan narasi kebencian—bukan hanya sebagai fenomena teknologis, tapi sebagai gejala sosial dan moral dalam masyarakat digital masa kini.

Refleksi dan Diskusi:

Masyarakat yang Digerakkan Algoritma

Di abad ke-21, algoritma telah mengambil peran sebagai kurator utama informasi publik. Ia menjadi penjaga gerbang wacana, pemilih mana yang viral dan mana yang tenggelam. Tapi tidak seperti editor media tradisional yang terikat etika jurnalistik, algoritma bekerja berdasarkan satu prinsip utama: **optimasi atensi**. Dan justru di sinilah letak persoalan mendasarnya.

1. Realitas Sosial Baru: Kebenaran Bukan Lagi Raja

Di masa lalu, otoritas informasi dipegang oleh media, akademisi, dan lembaga-lembaga publik. Kebenaran diperoleh melalui proses verifikasi dan debat terbuka. Namun kini, konten yang paling viral sering kali bukan yang paling benar, tapi yang paling provokatif. Ketika algoritma lebih menghargai engagement dibanding akurasi, maka kita hidup dalam realitas baru: **emosi menggantikan logika, popularitas mengalahkan kebenaran**.

Ini menciptakan pergeseran besar dalam struktur sosial informasi. Kebenaran menjadi relatif karena yang menentukan bukanlah fakta, melainkan jumlah likes dan shares. Dalam masyarakat seperti ini, perdebatan publik berubah dari ajang pertukaran ide menjadi arena bentrokan identitas.

2. Polarisasi Sebagai Produk Sampingan atau Tujuan?

Pertanyaan reflektif yang perlu diajukan: apakah polarisasi yang terjadi di media sosial adalah efek tak disengaja dari algoritma, atau justru produk yang dirancang? Jika kita meninjau dari perspektif kapitalisme digital, maka jawabannya cenderung condong pada yang kedua.

Platform seperti Facebook, TikTok, atau YouTube tidak secara eksplisit menginginkan kebencian, tapi mereka secara sadar menciptakan sistem yang memberi hadiah pada konten yang memecah belah. Polarisasi menghasilkan keterlibatan, dan keterlibatan menghasilkan keuntungan. Maka dalam logika bisnis, polarisasi bukan masalah—ia adalah **model ekonomi**.

3. Peran Kita: Korban, Pelaku, atau Penonton?

Sering kali kita memosisikan diri sebagai korban algoritma—seolah-olah semua yang terjadi di media sosial adalah sesuatu yang terjadi *kepada* kita, bukan *melalui* kita. Tapi refleksi yang jujur mengharuskan kita bertanya: sejauh mana kita sendiri berkontribusi dalam menciptakan ekosistem digital yang penuh kebencian?

Apakah kita memverifikasi sebelum membagikan?

Apakah kita terlibat dalam percakapan yang membangun, atau hanya memperkuat kelompok sendiri?

Apakah kita berani keluar dari zona nyaman informasi dan membuka diri pada perspektif berbeda?

Jika kita menjawab tidak pada semua pertanyaan itu, maka kita bukan hanya korban, tapi juga pelaku pasif.

4. Diskusi Etis: Batas Antara Kebebasan Ekspresi dan Tanggung Jawab Sosial

Media sosial sering membela algoritmanya atas nama kebebasan berekspresi. Namun kebebasan ini sering kali menjadi tameng bagi penyebaran kebencian, hoaks, dan kekerasan simbolik. Ini menimbulkan dilema etis yang harus kita hadapi secara kolektif:

Sejauh mana kebebasan berbicara boleh dibiarkan tanpa batas di ruang digital?

Apakah semua opini layak mendapat panggung algoritmik, bahkan jika itu merusak kohesi sosial?

Siapa yang bertanggung jawab ketika algoritma mendorong konten yang berujung pada kekerasan nyata?

Diskusi ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh insinyur atau manajer teknologi, tapi membutuhkan keterlibatan ahli etika, filsuf, pendidik, aktivis, dan masyarakat luas.

5. Dimensi Psikososial: Kehancuran Percakapan Publik

Salah satu konsekuensi paling merusak dari dominasi algoritma adalah **hilangnya ruang tengah**. Di masa lalu, orang dengan pandangan politik berbeda bisa duduk dalam satu forum dan berdiskusi. Kini, perbedaan itu menjadi pemisah yang tajam. Konten bernuansa, kompromis, atau penuh konteks tidak viral. Yang viral adalah yang menyederhanakan, mengolok-olok, dan memecah belah.

Hal ini menciptakan dua bahaya besar:

Dehumanisasi pihak lain: Lawan politik bukan hanya dianggap salah, tapi dianggap jahat. Polarisasi bukan sekadar perbedaan ide, tapi permusuhan identitas.

Kerusakan psikologis: Masyarakat yang terus menerus terekspos pada konten penuh kemarahan, kebencian, dan ketakutan akan mengalami kelelahan emosional dan trauma kolektif. Ini menciptakan masyarakat yang defensif, curiga, dan mudah terprovokasi.

6. Apakah Regulator Bisa Mengimbangi Teknologi?

Diskusi penting lainnya adalah tentang kesenjangan antara laju inovasi teknologi dan lambannya regulasi. Perusahaan media sosial berkembang dengan kecepatan luar biasa, sementara hukum dan kebijakan publik sering kali tertinggal beberapa tahun. Ini menciptakan kekosongan tanggung jawab.

Beberapa refleksi kritis:

Negara sering gagap dalam mengatur platform, terutama karena tekanan ekonomi dan politik.

Banyak regulasi justru disalahgunakan oleh pemerintah otoriter untuk membungkam kritik, alih-alih melindungi ruang publik.

Tantangan lintas batas: algoritma bersifat global, tapi hukum bersifat lokal. Siapa yang bertanggung jawab jika konten kebencian diproduksi di satu negara dan menyebabkan kekerasan di negara lain?

Solusi tidak mungkin datang hanya dari satu arah. Kita butuh regulasi cerdas, kolaborasi internasional, dan tekanan publik yang konsisten untuk mengubah struktur kekuasaan digital.

7. Haruskah Algoritma Dirombak atau Dihapus?

Salah satu topik diskusi paling radikal adalah apakah kita seharusnya tetap menggunakan algoritma untuk mengkurasi informasi. Beberapa pakar berpendapat bahwa algoritma tidak bisa diperbaiki karena fondasinya memang dirancang untuk memanipulasi perhatian.

Alternatif yang diajukan:

Kronologi murni: Linimasa yang disusun berdasarkan waktu, bukan engagement.

Kurasi editorial: Kembalinya peran kurator manusia dalam memilih konten, seperti editor surat kabar.

Model non-profit media sosial: Platform yang tidak bergantung pada iklan dan engagement, tapi pada kontribusi publik dan tujuan sosial.

Namun semua ini menghadapi pertanyaan besar: apakah masyarakat akan bersedia meninggalkan kenyamanan personalisasi demi tanggung jawab kolektif?

Kesadaran Baru: Dari Pengguna Pasif ke Warga Digital Aktif

Refleksi terakhir yang penting adalah perubahan paradigma dalam melihat diri sendiri. Kita bukan lagi sekadar pengguna media sosial—kita adalah **warga digital**. Ini membawa tanggung jawab yang tidak kalah penting dari warga negara di dunia nyata.

Sebagai warga digital, kita punya peran aktif untuk:

Mengkritisi algoritma yang kita konsumsi.

Memilih platform yang lebih etis.

Mendorong wacana publik yang sehat.

Melatih empati dan keterbukaan dalam diskusi online.

Kita perlu memahami bahwa setiap klik adalah suara. Setiap share adalah pernyataan politik. Setiap komentar adalah kontribusi terhadap iklim percakapan publik. Kesadaran ini adalah fondasi dari perlawanan terhadap dominasi algoritma yang tak bertanggung jawab.

Penutup: Menuju Ekosistem Digital yang Manusiawi

Algoritma tidak akan hilang. Mereka akan terus berkembang, semakin canggih, dan semakin menentukan cara kita melihat dunia. Tapi kita masih punya pilihan: apakah kita membiarkan teknologi menentukan nilai-nilai masyarakat, atau kita merebut kembali ruang publik digital untuk menjadi milik bersama?

Refleksi dan diskusi ini bukan akhir, tapi ajakan untuk mulai bergerak—dari pasrah menjadi sadar, dari reaktif menjadi reflektif, dari konsumen menjadi pembentuk.

Kalau kita gagal melakukan ini, maka masa depan informasi tidak akan ditentukan oleh kebenaran, melainkan oleh siapa yang paling bisa memanipulasi klik. Dan itu bukan dunia yang layak untuk kita wariskan.

Berikut adalah **glosarium** yang merangkum istilah-istilah penting terkait topik “*Algoritma Media Sosial, Polarisasi Politik, dan Narasi Kebencian*” beserta penjelasannya secara singkat dan jelas:

Glosarium

1. Algoritma

Serangkaian aturan atau instruksi logis yang digunakan oleh platform digital untuk menyaring, mengurutkan, dan merekomendasikan konten kepada pengguna berdasarkan perilaku dan preferensi mereka.

2. Media Sosial

Platform daring tempat pengguna dapat membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten atau orang lain. Contohnya termasuk Facebook, Twitter (X), YouTube, TikTok, dan Instagram.

3. Polarisasi Politik

Proses menguatnya perbedaan pandangan politik secara ekstrem, yang sering kali menyebabkan masyarakat terpecah menjadi dua atau lebih kelompok yang saling bertentangan secara tajam.

4. Narasi Kebencian

Rangkaian cerita, gagasan, atau pesan yang menyebarkan kebencian, permusuhan, atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu berdasarkan identitas seperti agama, ras, gender, atau orientasi politik.

5. Filter Bubble

Kondisi di mana pengguna internet hanya terpapar pada informasi atau sudut pandang yang selaras dengan keyakinan mereka sendiri karena penyaringan algoritmik.

6. Echo Chamber

Lingkungan sosial atau digital di mana seseorang hanya mendengar dan berinteraksi dengan pendapat yang memperkuat pandangannya sendiri, tanpa paparan terhadap pendapat yang berbeda.

7. Engagement

Ukuran keterlibatan pengguna terhadap konten di media sosial, seperti jumlah like, komentar, share, dan waktu tayang. Engagement tinggi sering menjadi dasar algoritma untuk menyebarkan konten lebih luas.

8. Disinformasi

Informasi yang salah atau menyesatkan yang disebar dengan sengaja untuk menipu, memengaruhi opini publik, atau memperburuk situasi sosial dan politik.

9. Hoaks

Berita palsu atau tipuan yang disampaikan sebagai fakta, sering kali digunakan untuk menyesatkan publik atau meraih perhatian secara instan.

10. Teori Konspirasi

Keyakinan bahwa suatu peristiwa besar dikendalikan oleh kelompok rahasia yang jahat, tanpa dasar bukti yang kredibel. Algoritma sering mendorong teori ini karena menarik minat tinggi.

11. Radicalization Pipeline

Proses bertahap di mana seseorang, melalui paparan konten yang semakin ekstrem secara algoritmik, terdorong untuk mengadopsi pandangan radikal atau ekstremis.

12. Ujaran Kebencian (Hate Speech)

Pernyataan atau ekspresi yang menyerang atau merendahkan seseorang atau kelompok berdasarkan identitas seperti agama, ras, etnis, gender, atau orientasi seksual.

13. Moderasi Konten

Upaya platform untuk mengatur dan menghapus konten yang melanggar kebijakan, termasuk ujaran kebencian, kekerasan, atau misinformasi.

14. Dark Posts

Iklan atau konten berbayar yang ditargetkan ke audiens tertentu dan

tidak dapat dilihat oleh publik umum. Sering digunakan untuk menyebarkan pesan politik secara tersembunyi.

15. Personalisasi

Penyesuaian tampilan konten untuk setiap pengguna berdasarkan histori interaksi, lokasi, dan preferensi mereka. Proses ini dikendalikan oleh algoritma.

16. Kronologi Linimasa

Metode penayangan konten berdasarkan urutan waktu publikasi, bukan berdasarkan relevansi atau engagement. Beberapa platform memberikan opsi ini sebagai alternatif algoritma.

17. Literasi Digital

Kemampuan untuk menggunakan, memahami, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara bijak dalam lingkungan digital, termasuk memahami cara kerja algoritma.

18. Kurasi Editorial

Pemilihan dan penataan konten oleh manusia (editor) berdasarkan kualitas, relevansi, dan keakuratan—berlawanan dengan kurasi algoritmik otomatis.

19. Kapitalisme Digital

Model ekonomi yang berfokus pada monetisasi data dan perhatian pengguna melalui platform digital, di mana engagement dijadikan komoditas utama.

20. Platformisasi

Fenomena di mana berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan politik bergeser ke dalam ekosistem yang dikendalikan oleh perusahaan teknologi melalui platform digital.

Berikut adalah contoh **Daftar Pustaka** dalam format **APA Style (7th Edition)**, yang mencakup referensi teoretis dan sumber relevan mengenai algoritma media sosial, polarisasi politik, dan narasi kebencian. Kamu bisa menyesuaikannya dengan gaya lain (MLA, Chicago, dll.) jika diperlukan.

Daftar Pustaka

- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). *Social media and fake news in the 2016 election*. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211–236.
<https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211>
- Bakshy, E., Messing, S., & Adamic, L. A. (2015). *Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook*. *Science*, 348(6239), 1130–1132. <https://doi.org/10.1126/science.aaa1160>
- Cinelli, M., Morales, G. D. F., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). *The echo chamber effect on social media*. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9), e2023301118.
<https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118>
- Gillespie, T. (2018). *Custodians of the Internet: Platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media*. Yale University Press.
- Guess, A., Nagler, J., & Tucker, J. (2019). *Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook*. *Science Advances*, 5(1), eaau4586.
<https://doi.org/10.1126/sciadv.aau4586>
- Klein, E. (2020). *Why we're polarized*. Avid Reader Press / Simon & Schuster.
- O'Neil, C. (2016). *Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy*. Crown Publishing Group.

Rudy C Tarumingkeng: Eksplorasi Pengaruh Algoritma Media Sosial terhadap Polarisasi Politik dan Narasi Kebencian

Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the Internet is hiding from you*. Penguin Press.

Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.

Tufekci, Z. (2018). *Twitter and Tear Gas: The power and fragility of networked protest*. Yale University Press.

Vaidhyanathan, S. (2018). *Antisocial media: How Facebook disconnects us and undermines democracy*. Oxford University Press.

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Council of Europe Report. <https://rm.coe.int/information-disorder-report/1680764666>

Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.

Kopilot artikel ini - tanggal akses: 3 Agustus 2025. Prompting dan Akun penulis ([Rudy C Tarumingkeng](https://chatgpt.com/g/g-B3hgivKK9-write-for-me/c/688f6b5c-0998-8326-8c01-29ea36a4d6ec)). <https://chatgpt.com/g/g-B3hgivKK9-write-for-me/c/688f6b5c-0998-8326-8c01-29ea36a4d6ec>